

**IMPLEMENTASI PROGRAM ROOTS DALAM PENUNTASAN
ISU PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

Disusun Oleh:

NAMA : KADEK JENY FEMILA DEVI
NPM : 2141021081
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Kadek Jeny Femila Devi
NPM : 2141021081
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Program Roots dalam
Penuntasan Isu Perundungan pada Satuan
Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *The implementation of the Roots Program to
Overcome Bullying in Jakarta Schools*

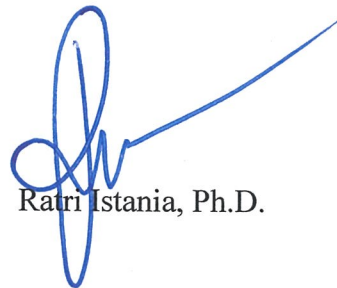
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Hamka MA

Pembimbing II



Ratri Istania, Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

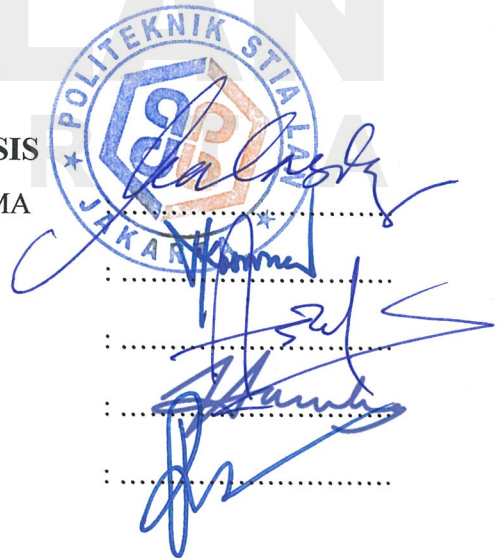
Nama : Kadek Jeny Femila Devi
NPM : 2141021081
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Program Roots dalam Penuntasan Isu Perundangan pada Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2023
Pukul : 07.30 s.d. selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Sekretaris : Prof. Dr. Luki Karunia, MA
Annggota : Dr. Asropi, M.Si.
Pembimbing 1 : Dr. Hamka, MA
Pembimbing 2 : Ratri Istantia, S. IP., Ph.D



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Jeny Femila Devi
NPM : 2141021081
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul “IMPLEMETASI PROGRAM ROOTS DALAM PENUNTASAN ISU PERUNDUNGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 30 Januari 2024



Kadek Jeny Femila Devi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Roots Anti dalam Penuntasan Isu Perundungan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Dki Jakarta”. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala ketulusan hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hamka, M.A., dan Ibu Ratri Istantia, Ph.D. selaku dosen pembimbing;
2. Ibu Ibu Dr Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si, dan Ibu Dr Mala Sondang Silitonga M.A. selaku dosen pembahas;
3. Bapak/Ibu dosen yang mengajar pada Program Studi Ilmu Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
4. Staf Bidang Administrasi Akademik dan Kerjasama Politeknik STIA LAN Jakarta;
5. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendampingi dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan magister ini;
6. Rekan-rekan mahasiswa magister Administrasi Pembangunan Negara Tahun 2021 yang telah memberikan semangat, dukungan, dan pengalaman yang menyenangkan;
7. Para pimpinan di Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selalu memberikan dukungan moril dan bantuan selama menyelesaikan pendidikan magister ini;
8. Rekan-rekan di Pusat Penguatan Karakter yang telah memberikan motivasi dan menemani setiap proses yang dilalui selama menyelesaikan pendidikan magister; serta
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas peran dan kontribusinya dalam suksesnya penelitian ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penelitian ini. Segala kritik dan saran akan diterima dengan baik demi pengembangan penelitian ini di masa depan. Besar harapan peneliti, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Jakarta, 14 Desember 2023

Peneliti,

Kadek Jeny Femila Devi

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Implementasi Program Roots dalam Penuntasan Isu Perundungan pada Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

Kadek Jeny Femila Devi, Hamka, Ratri Istania
kadekjeyfemiladevi@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Perundungan telah menjelma menjadi tantangan dalam dunia pendidikan karena memberikan dampak negatif diantaranya menurunkan kesempatan anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Asesmen Nasional 2022 menunjukkan 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan. Sebagai upaya memerangi perundungan Kemendikbudristek melaksanakan Program Roots sebagai intervensi anti perundungan yang berfokus pada upaya mewujudkan iklim yang aman di sekolah dengan pelibatan aktif peran siswa sebagai agen perubahan. Program Roots diimplementasikan sejak tahun 2021 dan masih akan diimplementasikan di tahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Roots menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, apa saja faktor penghambat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta, serta menyusun strategi implementasi Program Roots di DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan angka kasus kekerasan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta belum optimal dengan ditemukannya beberapa hambatan selama proses implementasi. Untuk memaksimalkan implementasi Program Roots di DKI Jakarta dapat dilakukan melalui penyesuaian restra, pelibatan aktif Satgas dan TPPK, sosialisasi fleksibilitas penggunaan dana BOS, pemanfaatan platform merdeka mengajar, mengadakan kelas empati, penanaman budaya anti kekerasan oleh orang tua, menginisiasi gerakan berani lapor tolak kekerasan, dan membangun suasana kelas yang inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat tersampaikan kepada para pemangku kepentingan sehingga proses implementasi Program Roots di DKI Jakarta dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Melihat Program Roots merupakan program yang terus berkembang, penting untuk melakukan inovasi terus menerus agar program ini dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Kata kunci: kebijakan publik; implementasi kebijakan; kebijakan pendidikan; program roots; perundungan.

ABSTRACT

The implementation of the Roots Program to Overcome Bullying in Jakarta Schools

Kadek Jeny Femila Devi, Hamka, Ratri Istania

kadekjeyfemiladevi@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Bullying has become a challenge in the world of education because it has negative impacts, including reducing children's opportunities to get quality education. The 2022 National Assessment shows that 36.31% of students have the potential to experience bullying. As an effort to combat bullying, the Ministry of Education and Culture issued Permendikbudristek 46/2023 concerning the prevention and handling of violence in educational unit environments, as well as implementing the Roots Program as an anti-bullying intervention that focuses on efforts to create a safe climate in schools by actively involving the role of students as agents of change. The Roots Program has been implemented since 2021 and will still be implemented in 2024. This research aims to find out how the Roots Program is implemented using the Van Meter and Van Horn implementation models, as well as the strategy for implementing the Roots Program in DKI Jakarta, which is one of the provinces with a high number of cases of violence. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of questionnaires, interviews, and documentation. The research results show that the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta has not been optimal, with several obstacles found during the implementation process. To maximize the implementation of the Roots Program in DKI Jakarta, this can be done through adjustments to the strategic plan, active involvement of the Task Force and Violence Prevention Unit, socialization of flexibility in the use of BOS funds, use of Merdeka Mengajar platforms, holding empathy classes, involving parents in cultivating a culture of anti-violence, initiating a movement to dare to report against violence, and building an inclusive classroom atmosphere. It is anticipated that the findings of this study will be shared with interested parties to facilitate the Roots Program's implementation in Jakarta. Since the Roots Program is a dynamic endeavor, ongoing innovation is essential to guaranteeing that the program can provide more beneficial results.

Keywords: public policy; implementation policy; education policy; bullying; roots program.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu	14
B. Tinjauan Kebijakan	18
C. Tinjauan Teoritis	26
D. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian	52
B. Sumber Data	53
C. Lokus Penelitian	54

D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	60
F. Instrumen Penelitian.....	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	65
B. Analisis dan Pembahasan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase bentuk perundungan yang paling banyak dialami siswa SMP dan SMA/SMK tahun 2021	5
Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak yang dilaporkan tahun 2022....	8
Gambar 1. 3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di DKI Jakarta	9
Gambar 1. 4 Kendala yang dihadapi sekolah saat implementasi Program Roots.	10
Gambar 2.1 Tahapan Pelaksanaan Program Roots	25
Gambar 2.2 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i> Van Meter dan Van Horn.....	37
Gambar 2.3 Model Berpikir	50
Gambar 3. 1 Gambaran Metode Pemilihan Informan.....	53
Gambar 3.2 Profil DKI Jakarta	55
Gambar 4. 1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di DKI Jakarta	65
Gambar 4. 2 Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan.....	66
Gambar 4. 7 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	71
Gambar 4. 8 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah	72
Gambar 4. 10 Paparan sosialisasi program Roots Indonesia kepada dinas pendidikan.....	85
Gambar 4. 11 Petunjuk pelaksanaan program Roots Indonesia.....	88
Gambar 4. 12 Alasan sekolah tidak melaksanakan program roots kembali di tahun 2022.....	92
Gambar 4. 13 Publikasi Program Roots dalam majalah sekolah	94
Gambar 4. 14 Publikasi program Roots di sekolah dalam buku panduan Orang Tua	94
Gambar 4. 15 Turunan isu prioritas pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah	98
Gambar 4. 16 Visi-misi Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 s.d. 2029	98

Gambar 4. 17 Sosialisasi Pendanaan Program Roots Indonesia
Kemendikbudikbudristek kepada dinas pendidikan 120



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	38
Tabel 2. 2 Daftar Telaah Dokumen.....	61
Tabel 3. 1 Daftar Satuan pendidikan Pelaksana Program Roots di DKI Jakarta Tahun 2021	55
Tabel 3. 2 Daftar Sekolah Pelaksana Program Roots 2021 yang Melaksanakan Kembali Program Roots tahun 2022	59
Tabel 3. 3 <i>Key Informant</i> Program Roots Anti Perundungan	59
Tabel 4. 1 Informan penelitian	67
Tabel 4. 2 Tindak lanjut satuan pendidikan berdasarkan indikator keberhasilan Program Roots Indonesia	73
Tabel 4. 3 Sumber pendaan Program Roots pada satuan pendidikan	75
Tabel 4. 4 Kriteria Fasilitator Guru sesuai pedoman teknis.....	77
Tabel 4. 5 Hasil tes awal dan tes akhir fasilitator guru	79
Tabel 4. 6 Kriteria Agen Perubahan sesuai pedoman teknis.....	80
Tabel 4. 7 Tabel Proses Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Program Roots	103
Tabel 4. 8 Hasil perbandingan alternatif strategi kebijakan.....	108
Tabel 4. 9 Tabel pemetaan sumber dukungan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan perundungan	109

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2: Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3: Instrumen Penelitian dan Hasil Wawancara
- Lampiran 4: Isian Formulir *Online*
- Lampiran 5: Dokumentasi penelitian
- Lampiran 6: Policy Brief



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perundungan atau *bullying* yang terjadi pada anak-anak merupakan masalah universal dan menjadi tantangan global yang dialami hampir seluruh negara di dunia karena berdampak buruk baik pada korban maupun pelaku perundungan (UNICEF, 2018d). Bagi jutaan siswa di seluruh dunia, lingkungan sekolah bukanlah tempat yang aman untuk belajar dan berkembang. Hasil PISA 2018 menunjukkan rata-rata pada 79 negara OECD, 23% siswa melapor pernah menjadi korban *bullying* setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (OECD, 2019). Bahkan 150 juta siswa, atau setengah dari siswa berusia 13-15 tahun melaporkan kekerasan teman sebaya terjadi di lingkungan sekolah (UNICEF, 2019).

Kekerasan telah diakui sebagai masalah yang serius oleh beberapa lembaga internasional. Pada tahun 1996, Majelis Kesehatan Dunia (*World Health Organizations*) mengadopsi resolusi yang mendeklarasikan kekerasan sebagai masalah utama kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Pada satuan pendidikan, intimidasi teman sebaya adalah bentuk kekerasan paling umum diantara anak-anak dan remaja. Selanjutnya pada Mei 2021, WHO dalam *World Health Assembly* ke-74 mengadopsi resolusi baru untuk mengakhiri kekerasan pada anak (UNICEF, 2021b). Resolusi ini menekankan peran pemerintah dan pemangku kepentingan mewujudkan zero violence dan menciptakan ruang yang aman bagi anak termasuk pada satuan pendidikan. Perundungan atau penindasan membahayakan hak anak, termasuk hak atas pendidikan seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (The United Nations, 1989). Khususnya pada anak-anak yang rentan seperti penyandang disabilitas, berasal dari keluarga miskin, pengungsi, anak-anak dari kelompok minoritas, dan anak-anak yang berbeda dari kelompok sebaya (UNICEF, 2022). Hal tersebut memperlihatkan fakta bahwa dunia sedang mengalami

darurat kekerasan kepada anak yang perlu untuk segera ditangani dan jika tidak diselesaikan akan berdampak pada kapasitas kesehatan, perilaku ilegal, ekonomi, dan hubungan sosial (Wolke et al., 2013).

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sebagai sebuah lembaga yang berperan menjadi katalisator gerakan global telah menginisiasi *Youth Manifesto* dan kampanye #ENDViolence yang disampaikan pada *Education World Forum* dan mendorong implementasi beberapa program anti kekerasan di sekolah pada lebih dari 80 negara menggunakan model yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayah (UNICEF, 2021a).

Kondisi tidak jauh berbeda dialami oleh Indonesia dimana sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan seharusnya dapat mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, tetapi justru menjadi tempat dimana kekerasan itu terjadi. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di berbagai media adalah kasus bunuh diri siswa SD di Banyuwangi karena kerap mendapat perundungan dari teman-teman di sekolah (Detik, 2023). Kasus ini menambah catatan kelam kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. *Organisation for Economix Co-operation and Development* (OECD) dalam penelitiannya merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan persentase murid yang mengalami perundungan yaitu sebesar 41,1% (Katadata, 2019). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri mencatat sepanjang tahun 2019, terjadi 153 kekerasan fisik dan psikis di satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK bahkan menimbulkan korban jiwa baik siswa maupun guru (Widadio, 2019).

Berdasarkan hasil Assesmen Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa 24,4% siswa berpotensi mengalami perundungan di Sekolah (Direktorat Sekolah Dasar, 2022). Hasil Asesmen Nasional ini mendukung data nasional mengenai perundungan di sekolah dari *Global School Health Survey* (GSHS) tahun 2015 menyatakan bahwa lebih dari 21% anak-anak usia 13-15 tahun atau setara dengan 18 juta anak melaporkan mengalami perundungan dalam satu bulan terakhir (UNICEF, 2018b). Bahkan berdasarkan data PISA (Program

Penilaian Pelajar Internasional), angka prevalensi perundungan di Indonesia tahun 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (OECD, 2019).

Kasus perundungan memang tidak hanya terjadi pada negara berkembang, tetapi negara berkembang merupakan negara yang berisiko tinggi terjadi perundungan (UNICEF, 2018d). Hal ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan anak yang layanan pendidikan yang rendah pada negara berkembang (UNICEF, 2018a). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Srivastava (2015) dimana pada negara berkembang, siswa disabilitas menjadi kelompok yang banyak dikecualikan dalam layanan pendidikan (Srivastava et al., 2015). Bukan hanya pada layanan pendidikan, tetapi juga pada perlindungan terhadap siswa disabilitas. Dibandingkan dengan anak-anak normal, peluang difabel lebih besar menjadi korban perundungan. Berdasarkan survei *The Anti-bullying Charity, Ditch the Label* menyatakan bahwa kemungkinan intimidasi kepada difabel mencapai 40%. Jumlah ini bertambah besar untuk anak dengan cacat fisik hingga 58%, dan anak dengan ketunaan belajar 62% (Tirto, 2017). Hal ini tentu bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi (Kementerian Sekretariat Negara, 2016).

Pandemi Covid-19 semakin mendorong meningkatnya kasus perundungan yang terjadi karena pada penggunaan gadget yang semakin meningkat (grid.id, 2021). *Center for Lifespan and Development (CLSD)* Universitas Gajah Mada menemukan bahwa 38,41% responden pernah menjadi pelaku perundungan siber, sementara 45,35% responden pernah menjadi korban (voanews.com, 2021).

Melihat fenomena maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyusun beberapa rencana strategis sebagai upaya menuntaskan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan serta memberikan

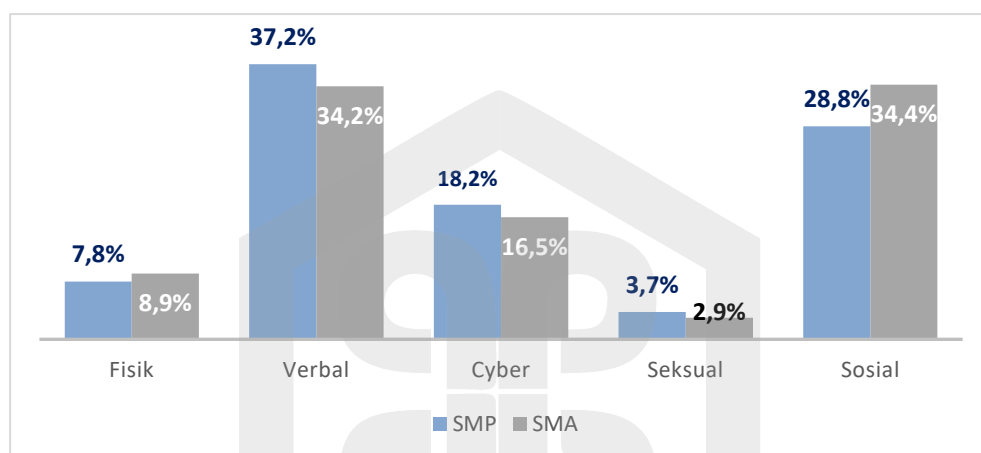
keamanan dan kenyamanan bagi semua warga sekolah, salah satunya dengan menjadikan pencegahan dan penuntasan Tiga Dosa Pendidikan sebagai salah satu kebijakan prioritas yang tertuang dalam Renstra Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2022).

Tiga Dosa Pendidikan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada tahun 2020 (Tempo, 2020). Tiga Dosa Besar Pendidikan yang dimaksud, yakni Intoleransi, Kekerasan Seksual, dan Perundungan adalah tindak kekerasan yang sangat marak terjadi di lingkungan sekolah yang jika dibiarkan akan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada tumbuh kembang anak baik kepada pelaku dan juga korban diantaranya perilaku agresif antar remaja, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, fungsi sosial, dan kesulitan belajar (Indonesiana, 2022). Kebijakan 3 Dosa Pendidikan juga sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana perlindungan anak didefinisikan sebagai segala aktivitas dalam menjamin dan melindungi anak dan haknya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2002).

Salah satu dari Tiga Dosa Pendidikan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan adalah perundungan atau biasa dikenal dengan istilah *bullying*. Perundungan adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh kelompok ataupun individu berulang kali dan dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan perundungan antara lain antara lain berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan relasional, dan kekerasan dunia maya (Menesini & Salmivalli, 2017).

Berdasarkan hasil survei awal perundungan di sekolah, bentuk perundungan yang paling banyak dialami oleh siswa jenjang SMP dan SMA sebelum melaksanakan program Roots adalah perundungan verbal dan perundungan relasi sosial (Puspeka, 2021a).

Gambar 1. 1 Persentase bentuk perundungan yang paling banyak dialami siswa SMP dan SMA/SMK tahun 2021



Sumber: diolah peneliti, dari data Puspeka (2021)

Dampak perilaku perundungan bagi siswa lebih luas dari sekadar ruang lingkup akademik. Menurut Michigan Association of School Administration, siswa yang berulang kali mengalami perundungan kemungkinan mengalami gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, sulit tidur. Efek samping ini muncul bersama dengan perasaan cemas untuk pergi ke sekolah dan berpartisipasi dalam pembelajaran yang menyebabkan turunnya prestasi akademik. Bahkan berdasarkan data, diperkirakan sebanyak 160.000 anak membolos sekolah setiap harinya dan total 5,4 juta siswa membolos sekolah setiap hari karena intimidasi (stompoutbullying.org, 2020). Dampak dari perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh pelaku perundungan. Pelaku perundungan memiliki kecenderungan aktif dalam perilaku kekerasan, mencuri, merusak properti, merokok, mengonsumsi minuman keras, prestasi akademik yang buruk, dan kemungkinan melakukan kejahatan serius di kemudian hari (Public School Review, 2022).

Asesemen Nasional 2021 menunjukkan bahwa semakin pendidik atau kepala satuan pendidikan memahami tentang konsep perundungan, semakin berkurang insiden perundungan yang terjadi. Karena itu diperlukan sebuah program intervensi yang bersifat masif dan memberikan pemahaman baik

kepada kepala satuan pendidikan, pendidikan, siswa, maupun warga sekolah lainnya terkait dengan perundungan (Direktorat SMA, 2022).

Salah satu upaya penuntasan perundungan yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek adalah Program Roots Anti Perundungan. Program Roots merupakan model intervensi untuk mencegah perundungan dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk membantu menciptakan iklim yang aman dan nyaman dan telah diterapkan pada 56 sekolah menengah (24.191 siswa) di Amerika Serikat. Penelitian dari Princeton University, Rutgers University, dan Yale University, yang dilakukan di New Jersey Amerika Serikat ini bertujuan untuk menyebarkan pesan tentang bahaya perundungan dan konflik di sekolah. Program Roots merupakan model intervensi berbiaya rendah, dapat diimplementasikan, dengan sumberdaya yang terbatas, dan memanfaatkan jejaring sosial untuk memaksimalkan dampak dari intervensi program (Bowes et al., 2013). Hasil dari intervensi di Amerika Serikat sendiri menunjukkan sekolah yang menerapkan program anti perundungan berbasis teman sebaya menunjukkan bahwa angka konflik antar siswa berkurang hingga 30% selama satu tahun (Paluck et al., 2016).

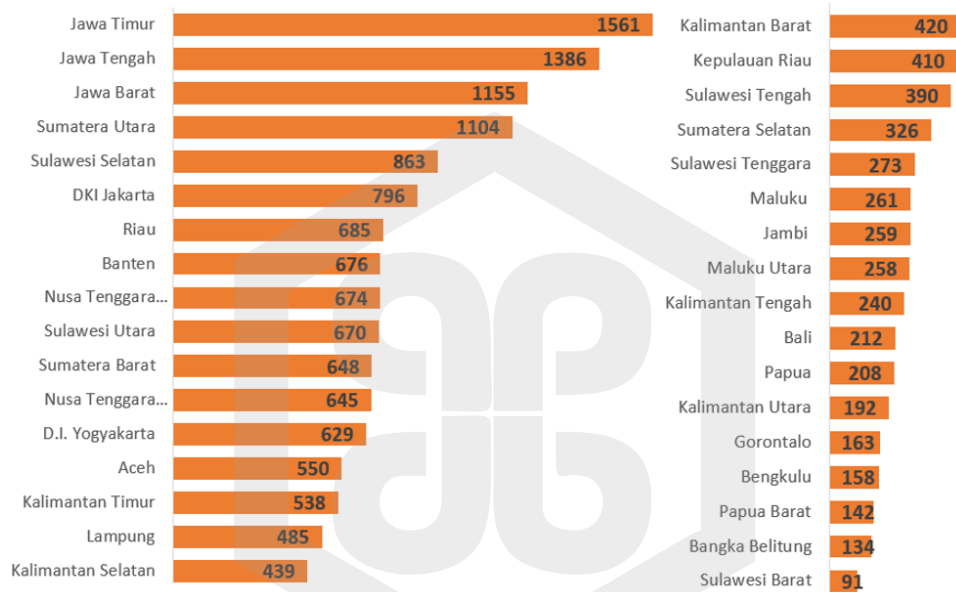
Program Roots sendiri pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2016 dan diujicobakan pada 2 SMP di Sulawesi Selatan yang menjangkau 3.568 pelajar, dan 4 SMP di Jawa Tengah yang menjangkau 2.770 pelajar usia 12-15 tahun. Pada tahun 2019 dilakukan uji coba tahap kedua di 12 satuan pendidikan di Papua Barat dengan melibatkan 3.101 siswa (Keysinaya & Nuraeni, 2022). Mekanisme pemilihan agen perubahan dilakukan dengan meminta siswa memilih teman sebaya yang memiliki pengaruh dalam jejaring sosial mereka, dan siswa terpilih tersebut selanjutnya menjadi agen perubahan yang mendapatkan materi serta mengimplementasikan aktivitas Program Roots. Pada sekolah-sekolah percontohan di Sulawesi Selatan, rata-rata perilaku perundungan menurun hingga 29% dan viktimisasi menurun hingga 20% setelah program dilakukan (UNICEF, 2017). Sementara Program Roots di Jawa Tengah menunjukkan bahwa tindakan perundungan dan korban melapor

sedikit meningkat sejak penelitian baseline karena meningkatnya kesadaran siswa dan guru tentang konsep perundungan (UNICEF, 2018b). Penurunan juga terjadi di Provinsi Papua Barat dimana angka perundungan menurun di kisaran 20-30%.

Melihat keberhasilan dari program Roots di Amerika yang mampu menurunkan angka perundungan hingga 30%, dan 29,6% pada sekolah piloting di Sulawesi Selatan, maka pada tahun 2021 Kemendikbudristek bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan mitra melaksanakan program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah melalui Program Roots ke lebih dari 574 SMP Penggerak, 382 SMA Penggerak dan 881 SMK Pusat Keunggulan yang akan melibatkan siswa sebagai agen perubahan dan guru sebagai fasilitator. Sementara pada tahun 2022, Program Roots diimplementasikan pada 1.848 SMP, 1.765 SMA, dan 1.944 SMK.

Salah satu daerah yang memiliki angka kasus kekerasan tertinggi dan mengimplementasikan Program Roots pada tahun 2021 dan 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta, dimana pada tahun 2022 DKI Jakarta menduduki peringkat kedua daerah dengan kasus pelanggaran hak anak tertinggi yaitu sebanyak 769 kasus (CNN, 2023). Berdasarkan data Simfoni KemenPPPA, pada tahun 2022 DKI Jakarta melaporkan terjadi sebanyak 796 kasus kekerasan pada anak, dan menduduki peringkat kelima tertinggi di Indonesia (KemenPPA, 2023).

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak yang dilaporkan tahun 2022

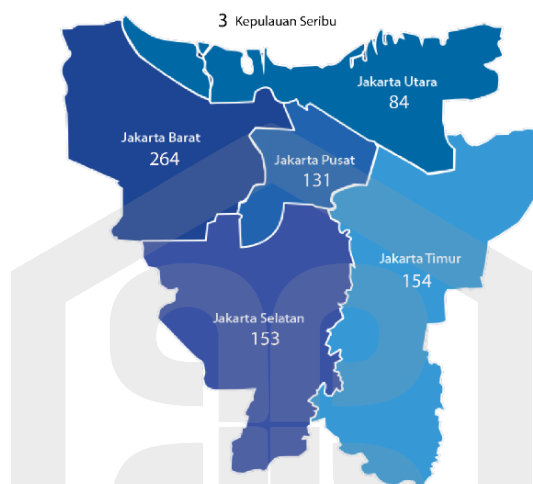


Sumber: Simfoni KemenPPPA, 2023

Walaupun berada di peringkat kelima daerah dengan jumlah kasus tertinggi, tetapi rate korban kekerasan DKI Jakarta mencapai 2,7 yang artinya hampir 3 dari 10,000 anak di DKI Jakarta menjadi korban kekerasan. Angka ini lebih tinggi dari Jawa Timur (1,5), Jawa Tengah (1,4), Jawa Barat (0,7), dan Sumatera Utara (2,2).

Sementara dari data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sendiri, sepanjang tahun 2021 terdapat 789 korban kekerasan terhadap anak-anak (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2022).

Gambar 1. 3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di DKI Jakarta



Sumber: Diolah peneliti dari P2TP2A Jakarta, 2023

Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 81,65 (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2022). Fenomena yang terjadi di DKI Jakarta memperlihatkan bahwa tingginya tingkat pendidikan tidak serta merta mendongkrak pemahaman terhadap kekerasan dan perundungan, terbukti dengan kasus kekerasan anak masih menjadi masalah serius di DKI Jakarta. Berdasarkan data P2TP2A juga diperoleh fakta bahwa sebanyak 60,14% korban kekerasan merupakan anak-anak usia 0-17 tahun. (Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik DKI Jakarta, 2021).

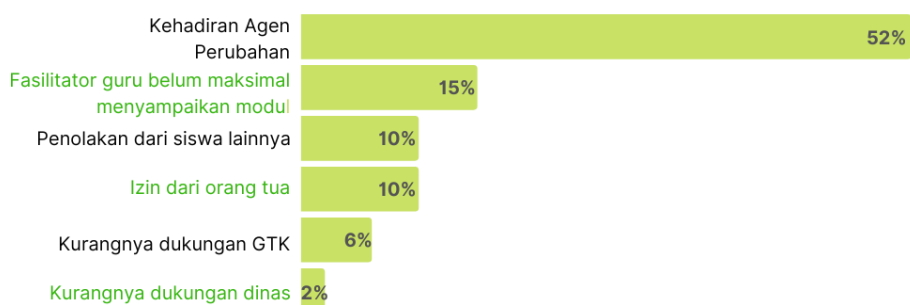
Kasus kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan di Provinsi DKI semakin bertambah karena intensitas penggunaan internet selama pandemi Covid-19 yang meningkatkan risiko perundungan daring (*cyber bullying*) hingga sekarang (Kompas, 2020b). Salah satu kasus perundungan siber yang mengakibatkan hilangnya nyawa siswa adalah kasus bunuh diri murid SMP Negeri 147 Jakarta yang melompat dari gedung sekolahnya karena mengalami perundungan siber. Dari pesan yang ditemukan dalam *handphone* korban terlihat jika korban merasa depresi yang berujung pada tindakan bunuh diri (BBC Indonesia, 2020). Kasus serupa juga dialami oleh siswa SMK di

Cilincing yang dirundung oleh enam kakak seniornya hingga mengalami luka fisik pada Oktober 2021 (CNN Indonesia, 2022).

Dalam pelaksanaannya, implementasi Program Roots tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala dan hambatan yang dirasakan sekolah berdasarkan hasil survei terhadap 126 sekolah pelaksana Program Roots tahun 2021, antara lain komitmen dari agen perubahan yang belum maksimal untuk hadir dalam pelatihan, fasilitator guru yang belum maksimal dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan modul, penolakan dari beberapa siswa ketika terpilih menjadi agen perubahan, serta dukungan dari warga sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Bahkan berdasarkan hasil survei terhadap satuan pendidikan pelaksana program Roots tahun 2021, hanya 21,42% satuan pendidikan yang mengimplementasikan Program Roots di tahun 2022. Angka ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi Program Roots pada satuan pendidikan mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program sehingga tidak melanjutkan Program Roots di tahun berikutnya, sementara keberlanjutan program ini merupakan salah satu poin yang menjadi indikator keberhasilan upaya pencegahan perundungan yang sedang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek (Kemendikbudristek, 2021b).

Gambar 1. 4 Kendala yang dihadapi sekolah saat implementasi Program Roots

Kendala Pelaksanaan Program Roots



Sumber: diolah peneliti dari data Puspeka Kemendikbudristek, 2022

Pada tahun 2024, Program Roots direncanakan akan diimplementasikan selain pada sekolah-sekolah yang menjadi target sasaran berdasarkan hasil Asesmen Nasional, Kemendikbudristek juga menargetkan akan memberikan bimbingan teknis program pencegahan dan penanganan perundungan bagi sekolah dasar, serta pembelajaran mandiri digital pencegahan dan penanganan perundungan bagi sekolah yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan Program Roots secara mandiri. Sebelum Program Roots diimplementasikan pada lebih banyak satuan pendidikan, serta diluncurkan sebagai pembelajaran mandiri digital pencegahan dan penanganan perundungan bagi ekosistem sekolah, maka implementasi pelaksanaan Program Roots ini sangat perlu diperhatikan. Namun sejak diimplementasikannya Program Roots tahun 2021, Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) belum pernah melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi Program Roots pada satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan program ini.

Melihat bahwa kasus perundungan di lingkungan pendidikan menjadi salah satu tantangan besar yang sedang dihadapi oleh Indonesia membuat kebijakan pencegahan dan penuntasan perundungan di satuan pendidikan menjadi salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang harus segera ditangani. Salah satu upaya penuntasan perundungan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek adalah pelaksanaan Program Roots pada satuan Pendidikan. Penggunaan anggaran dan sumber daya yang tidak sedikit, serta komitmen Kemendikbudristek yang masih akan mengimplementasikan Program Roots pada tahun-tahun berikutnya mendorong peneliti untuk menganalisis lebih lanjut implementasi Program Roots dalam Penuntasan Isu Perundungan pada satuan pendidikan khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian, berikut identifikasi masalah yang dihadapi antara lain:

1. Program pencegahan dan penanganan kekerasan serta perundungan belum tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan DKI Jakarta

2. Masih terdapat satuan pendidikan kurang berkomitmen dalam mengimplementasikan Program Roots karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
3. Fasilitator guru kesulitan dalam regenerasi fasgu karena guru-guru lain tidak mendapatkan bimbingan teknis Program Roots
4. Masih belum optimalnya komunikasi dengan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain sehingga banyak program yang memiliki kemiripan dengan Program Roots harus dilaksanakan juga oleh sekolah.
5. Kurangnya pengawasan secara hirarkis terhadap proses implementasi kebijakan.
6. Implementasi Program Roots masih terpengaruh dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Melihat besarnya dampak yang akan dihasilkan dari Program Roots, dan banyaknya *resource* yang digunakan untuk mengimplementasikan Program Roots pada satuan pendidikan, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait implementasi Program Roots dengan judul “Implementasi Program Roots dalam Penuntasan Isu Perundangan pada Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta” sehingga tersusun strategi untuk mengatasi faktor penghambat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta agar dapat diimplementasikan secara lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penghambat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta?
2. Apa strategi untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta.

2. Untuk menyusun strategi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, yaitu memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep implementasi dalam proses implementasi kebijakan Program Roots Anti Perundungan pada satuan pendidikan di DKI Jakarta, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis, yaitu memberikan informasi bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat tentang bagaimana implementasi Program Roots pada satuan pendidikan di DKI Jakarta, serta memberikan rekomendasi strategi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi Program Roots yang diharapkan dapat menjadi acuan bukan hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan satuan pendidikan lain dalam mengimplementasikan Program Roots Anti Perundungan.